

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis ekonomi global mendorong negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan) untuk memperkuat kerja sama di bidang perdagangan, investasi, dan keuangan. Upaya ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat dan sistem keuangan yang didominasi negara-negara Barat. Strategi yang ditempuh dengan memulai penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral dan pendirian Bank Pembangunan Baru sebagai alternatif bagi lembaga keuangan internasional yang ada.

BRICS dibentuk sebagai respons terhadap lambatnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota G8. Kelompok G8 terdiri atas delapan negara maju, yaitu Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Uni Eropa. Rusia juga termasuk dalam anggota ini, namun Rusia tidak sepenuhnya berpartisipasi dalam organisasi G8 (Alfiyah et al. 2024).

Kegagalan sistem ekonomi kapitalis neoliberal yang diterapkan oleh negara-negara G-8 mengakibatkan krisis keuangan yang melanda dunia pada tahun 2008 dan masih merupakan krisis yang tidak dapat disembuhkan (Anup Shah 2013). Liberalisasi sektor keuangan dan penciptaan pasar keuangan derivatif telah menyeret masyarakat dunia ke jurang krisis yang mendalam. Dimana dampak krisis tersebut menyeret negara-negara berkembang sebagai korban, yaitu dengan merancang strategi baru guna menjadikan negara-negara berkembang sebagai tempat mengambil sumber daya melalui investasi, menciptakan ketergantungan baru melalui utang, dan mendorong terbukanya pasar bagi perluasan produk-produk negara maju.

BRIC merupakan pertama kali digunakan oleh ekonom Goldman Sachs Jim O'Neill untuk menggambarkan empat ekonomi yang, jika pertumbuhannya dipertahankan, dapat mendominasi ekonomi global pada tahun 2050. Perwakilan negara-negara BRIC pertama kali mulai bertemu secara informal selama pertemuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2006 (Kenny 2025). Kemudian berganti nama menjadi BRICS setelah Afrika Selatan bergabung pada tahun 2010.

BBC News melaporkan pada tahun 2013 bahwa ekonom O'Neill “penemu” istilah BRIC tidak menyetujui bergabung dengan Afrika Selatan dalam hal kemampuan ekonomi (BBC 2024). Meski begitu, keberadaan Afrika Selatan merupakan representasi kawasan Afrika. Meskipun pertemuan awal BRIC pada awalnya lebih menyoroti peluang investasi, BRICS kemudian bertransformasi menjadi blok geopolitik dengan tujuan memperkuat suara negara-negara berkembang.

Terbentuknya BRICS mendorong negara-negara berkembang mencari alternatif dalam tatanan perekonomian dunia. Pada awal abad ke-21, ketidakpuasan terhadap dominasi negara-negara Barat di lembaga keuangan internasional, seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, semakin meningkat (Larasati 2024). Krisis keuangan global tahun 2008 mencerminkan rentannya sistem keuangan global yang didominasi oleh negara-negara maju, sehingga mendorong negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat untuk membentuk strategi terpadu untuk memperkuat posisinya dalam perekonomian global (Larasati 2024).

Urgensi pembentukan BRICS didorong oleh keinginan untuk menciptakan tatanan ekonomi global yang lebih multipolar dan mengurangi dominasi negara-

negara Barat. Negara-negara anggota BRICS memiliki jumlah penduduk yang signifikan yaitu sekitar 40% penduduk dunia, dan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) global semakin besar. Pada tahun 2022, BRICS akan menguasai 31,5% perekonomian global, sedangkan G7 hanya menguasai 30% (Prasetyantoko 2023).

Selain itu, BRICS berupaya memperkuat peran negara-negara berkembang dalam pengambilan keputusan global dan mereformasi lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Mereka juga menekankan pentingnya kerja sama di bidang infrastruktur, energi dan teknologi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di negara-negara anggota. Dengan menetapkan strategi kemitraan, BRICS bertujuan untuk meningkatkan daya tawar kolektif dalam negosiasi internasional dan menciptakan mekanisme kerja sama yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini mencerminkan pentingnya negara-negara berkembang untuk memiliki platform yang dapat mewakili kepentingan mereka dalam perubahan tatanan ekonomi global.

Pada KTT BRICS tahun 2023 di Afrika Selatan, BRICS mengumumkan penerimaan Arab Saudi, Iran, Uni Emirat Arab, Mesir, Etiopia, dan Argentina sebagai negara anggota baru. Segera setelah menjadi presiden Argentina, Javier Milei mengumumkan bahwa negaranya tidak akan bergabung dengan organisasi tersebut, sementara negara lain menjadi anggota pada tahun 2024 (Kenny 2025). Indonesia bergabung dengan blok ini sebagai anggota penuh pada tanggal 6 Januari 2025.

BRICS telah memperluas agenda kerjanya dengan mencakup isu-isu global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan dan kesehatan. Mereka juga

menekankan pentingnya reformasi sistem pemerintahan global untuk mencerminkan realitas ekonomi dan politik saat ini, serta meningkatkan peran negara-negara berkembang dalam pengambilan keputusan internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, BRICS telah menunjukkan komitmennya untuk memperkuat kerja sama di bidang teknologi dan inovasi, dengan tujuan meningkatkan daya saing ekonomi para anggotanya dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Mereka juga berupaya meningkatkan konektivitas dan integrasi ekonomi melalui inisiatif seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitasi perdagangan.

Dalam perjalanannya, BRICS mengambil kebijakan penting yaitu mendirikan Bank Pembangunan sendiri untuk bersaing dengan *International Monetary Fund* (IMF) dan Bank Dunia. Bagi Rusia, dimasukkannya rencana bank tersebut pada pertemuan puncak BRICS ke-6 di Brasil merupakan peluang penting untuk meningkatkan kemandirian ekonominya dari dominasi Barat. Instrumen kebijakan keuangan penting yang terkait dengan *New Development Bank* (NDB) adalah *Contingent Reserve Arrangement* (CRA) (Toussaint 2024). Didirikan pada tahun 2015, fungsi utama CRA adalah memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara anggota yang menghadapi masalah Biaya Operasional (BoP) atau mengalami tekanan likuiditas jangka pendek (Efsas 2023). Hal ini membantu negara-negara mengatasi ketidakseimbangan sementara dalam pembayaran internasional dan menjaga stabilitas keuangan eksternal. Pembentukan CRA dan rencana Bank Pembangunan yang disebut (NDB) akan bertentangan langsung dengan dominasi IMF yang memiliki aset sebesar 300 miliar USD dan Bank Dunia

sebesar 490 miliar USD (Efsas 2023). Keduanya, selama ini, dinilai terlalu didominasi oleh perekonomian Amerika Serikat dan mata uangnya.

Rusia adalah acuan bagi perkembangan BRICS yang semakin bersinar. Kemudian, kekuatan anggota BRICS dapat dilihat dari PDB yang didapat, menunjukkan bahwa lima negara BRICS ini mampu menyumbang 11 triliun PDB, berbanding 4 triliun lebih banyak AS dengan 15 triliun (Idris et al. 2022). perbedaan ini tidak terlalu menonjol bisa dikatakan juga BRICS mempunyai pengaruh yang sama kuat .

Negara-negara adidaya, terutama Amerika Serikat dan sekutunya, mulai khawatir dengan semakin besarnya pengaruh BRICS yang dapat menantang dominasi mereka dalam tatanan ekonomi dan politik global. Kekhawatiran ini terutama terkait dengan upaya BRICS untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam perdagangan internasional dan menciptakan sistem pembayaran baru. Amerika Serikat telah menyatakan sikapnya mengenai upaya BRICS untuk de-dolarisasi, dengan ancaman dampak ekonomi. Ketegangan tersebut dapat meningkat menjadi konflik ekonomi yang lebih luas, yang dapat mengancam kohesi dan tujuan aliansi tersebut.

Reaksi negara-negara seperti Uni Eropa dan AS, yang berusaha mempertahankan dominasinya dalam tatanan global, tidak boleh diremehkan. Tekanan ekonomi dalam bentuk diskriminasi terhadap anggota BRICS, atau kendali atas akses ke pasar global, dapat melumpuhkan kapasitas kolektif anggota BRICS (Hermawan 2025). Dominasi dolar AS juga memberikan tantangan terhadap upaya de-dolarisasi BRICS. Selain itu, kampanye diplomatik global yang dilakukan di negara-negara Barat, termasuk membangun koalisi dengan negara-

negara berkembang di luar BRICS, dapat mengisolasi blok tersebut secara politik dan ekonomi, sehingga mengurangi pengaruhnya terhadap isu-isu global (Intan 2024). Bobot geopolitik ini lebih kental daripada konteks keanggotaan Indonesia dalam OECD karena pelaku pasar internasional (khususnya dari negara-negara maju seperti G7 dan OECD) melihat Indonesia sudah memiliki bias keterbukaan ekonomi dan dependensi ekonomi yang signifikan terhadap China (Intan 2024).

Kemunculan isu BRICS sering kali menjadi headline di media massa Indonesia karena isu ini berdampak langsung terhadap perekonomian nasional. Di tengah ketidakpastian global, pemberitaan BRICS memberikan gambaran kemungkinan perubahan tatanan perekonomian internasional yang pada akhirnya mempengaruhi kebijakan dalam negeri. Media massa Indonesia memanfaatkan isu BRICS untuk menarik perhatian publik karena narasinya menawarkan dimensi konflik antara kekuatan global lama dan baru. Hal ini menimbulkan rasa penasaran di kalangan pembaca yang ingin memahami bagaimana dinamika geopolitik mempengaruhi perekonomian nasional. Selain itu, pemberitaan BRICS mengandung unsur kontroversial seperti pergeseran kekuasaan dan model ekonomi alternatif yang sangat relevan dengan perkembangan politik dan ekonomi di Indonesia. Sehingga, isu ini selalu menjadi topik hangat dalam wacana publik.

Misalnya, dua media, The Jakarta Post dan Kompas.com, memiliki pendekatan pemberitaan yang berbeda namun saling melengkapi dalam menyajikan isu BRICS. The Jakarta Post cenderung menggunakan bahasa analitis dan global, menyajikan data statistik dan kutipan dari para ahli ekonomi untuk menggambarkan pentingnya BRICS dalam tatanan internasional. Sebaliknya, Kompas.com sering memfokuskan pemberitaannya pada dampak BRICS terhadap kebijakan nasional dan kehidupan

sehari-hari masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan kultural, Kompas.com mempertemukan isu global dengan dinamika sosial politik dalam negeri sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca lokal.

Fokus penelitian ini melihat The Jakarta Post dan Kompas.com pada periode 18 Juni 2024 hingga 31 Januari 2025, jumlah berita yang dianalisis dari The Jakarta Post sebanyak 25 berita dan Kompas.com sebanyak 34 berita. Penggunaan teori framing yang dikemukakan oleh Pan dan Kosicki memberikan perspektif yang sangat relevan untuk menganalisis pemberitaan media BRICS, diharapkan kedua media ini dapat memberikan bingkai isu BRICS dalam perspektif masyarakat yang lebih luas. Teori ini menekankan pada cara media memilih dan menyajikan informasi untuk membentuk interpretasi tertentu terhadap suatu peristiwa atau isu. Melalui framing, media dapat mempengaruhi cara masyarakat memahami dan menanggapi isu-isu yang diberitakan, termasuk cara mereka memandang aliansi ekonomi- politik seperti BRICS.

Kebanyakan penelitian yang ada cenderung mengutamakan media asing atau media barat, sedangkan media Indonesia jarang disebutkan sebagai konteksnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru mengenai bagaimana komunikasi di Indonesia mempengaruhi opini publik dalam menyelidiki isu-isu ekonomi global bersama BRICS, dan bagaimana hal ini berdampak pada masyarakat Indonesia dalam memahami isu dinamika ekonomi global.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana framing pemberitaan tentang BRICS pada The Jakarta Post dan Kompas.com menggunakan teori Pan & Kosicki?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana media bagaimana framing pemberitaan tentang BRICS pada The Jakarta Post dan Kompas.com dengan sudut pandang ekonomi politik media menggunakan teori Pan & Kosicki.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian menggunakan perangkat framing terhadap pemberitaan tentang BRICS pada The Jakarta Post dan Kompas.com antara lain:

1.4.1 Manfaat Akademis

- 1) Memberikan kontribusi teoritis pada kajian framing media, khususnya penerapan model Pan dan Kosicki dalam konteks isu ekonomi-politik global.
- 2) Memperkaya literasi ekonomi politik media dengan mengaitkan konstruksi berita BRICS dengan kepentingan ideologis dan struktural media.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Membantu media meningkatkan kualitas pemberitaan dengan menyadari bias framing yang mungkin timbul.
- 2) Memberikan perspektif kritis kepada publik dalam menafsirkan berita BRICS, sehingga dapat membentuk pemahaman yang lebih objektif.

1.5 Batasan Masalah

Untuk memastikan penelitian ini tetap fokus dan sistematis, beberapa batasan ditetapkan:

1. Subjek Penelitian: Berita tentang BRICS yang dipublikasikan oleh The Jakarta Post dan Kompas.com.
2. Periode Penelitian: Berita yang diterbitkan dalam periode 18 Juni 2024 - 31 Januari 2025.

Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga ketepatan dan relevansi penelitian, sehingga hasil yang diperoleh dapat memberikan kontribusi yang lebih akurat dalam memahami framing media terhadap BRICS di Indonesia (Pan & Kosicki, 1993).